

## Editorial

# Pembangunan: Menukik Lebih Dalam?

*Didimus Dedi Dhosa*

Program studi Administrasi Publik sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, akhirnya menerbitkan jurnal online edisi pertama pada Maret 2020. Jurnal ini diberi nama JAP UNWIRA. JAP merupakan singkatan dari Jurnal Administrasi Publik. Kata UNWIRA adalah singkatan dari Universitas Widya Mandira. Nama jurnal dengan demikian melekat pada karakter institusi yang memiliki motto: “Ut Vitam Habeant Abundantius”.

Tim redaksi pernah menerbitkan jurnal ilmiah program studi edisi Januari-Juni 2018, edisi cetak dengan nama jurnal yang sama seperti kali ini. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya pengelola jurnal dan kekurangan artikel, maka sejak itu redaksi seolah mati suri karena tidak memublikasikan artikel secara konsisten.

Kali ini diinspirasi oleh semangat untuk meningkatkan karya akademik dosen, mahasiswa, peneliti, dan semua pihak yang memiliki *passion* pada publikasi ilmu-ilmu sosial, redaksi kembali hadir ke hadapan pembaca dengan enam artikel baik yang dihasilkan dari studi lapangan maupun kajian kepustakaan. Dalam semangat yang tinggi ini pula redaksi berkomitmen untuk menerbitkan JAP UNWIRA secara konsisten dan periodik sebanyak dua kali dalam setahun yakni antara Januari-Juni dan Juli-Desember.

Pasca perang dingin, wacana pembangunan menjadi isu hangat yang diperbincangkan secara global. Perdebatan paradigmatis para proponent ideologi pembangunan berlangsung secara krusial dan alot. Paling tidak, perdebatan bermuara pada dua hal penting: pada satu sisi terdapat para pengusung yang menjadikan negara sebagai entitas yang bertanggungjawab terhadap kemaslahatan warga. Sementara itu, pada sisi lain, terdapat para pengusung pasar bebas dimana pasar harus mengambil sebagian besar peran negara untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

Indonesia di bawah rezim Soeharto berusaha membuka pasar melalui Undang-Undang penanaman modal asing pada tahun 1967/1968. Periode ini merupakan cikal-bakal mengalirnya arus investasi asing ke Indonesia, yang dalam tataran tertentu berada di bawah kendali negara khususnya Soeharto dan militer yang berfiliasi dengan pengusaha China di Indonesia (Robison 2009). Pada era ini, pembangunan berpusat pada negara yang sentralistik yang dikendalikan oleh Soeharto.

Pasca-otoritarian 1998, kebebasan pers mulai bertumbuh. Partisipasi masyarakat sipil dalam arena politik praktis tampak aktif. Pemilihan umum digelar secara periodik. Hal-hal ini menandakan pergeseran kekuasaan yang semula sentralistik menuju desentralistik. Apakah ini adalah tanda pendalaman demokrasi, suatu pergeseran dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial?

Di tataran praksis sebagaimana ditunjukkan Robison dan Hadiz (2004), sesudah kejatuhan Orde Baru, yang terjadi adalah penataan kembali kekuasaan yang dimonopoli oleh kaum oligark. Karena itu, pembangunan institusi-institusi di Indonesia masih terjebak pada watak predatoris lama meski yang mengatur sirkulasi kekuasaan adalah wajah baru baik di tingkat pusat maupun di ranah lokal.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi NTT pada tahun 2018 silam tidak beringsut jauh dari reorganisasi kekuasaan. Para kandidat yang bertarung dalam kontestasi elektoral adalah wajah-wajah lama yang menguasai kanal-kanal partai politik, dan yang berafiliasi dengan oligopoli. Pemegang kekuasaan yang menghidupi watak predator tampak sukar mengesampingkan kepentingan ekonomi politiknya.

Karena itu, harapan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira agar Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih perlu memerhatikan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana terbaca dari hasil penelitian survei Marianus Kleden dalam artikel pertama di jurnal ini, akan

mengalami tantangan serius. Tantangan ini perlahan-lahan mulai terkuak ke publik ketika pemerintah Provinsi NTT menjadikan pariwisata sebagai lokomotif yang menggerakkan gerbong bidang lain untuk menghantar massa rakyat kepada kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru mengeliminasi massa rakyat dari tanah dan lingkungan sosial-budaya, sembari di saat bersamaan, kebijakan tersebut memfasiliasi akumulasi kapital elit negara dan elite ekonomi-politik asing yang berkolaborasi dengan elite nasional (bdk. Dale 2013).

Problem politik di NTT merupakan salah satu dari sekian banyak potret politik global. Kita bisa menambah deretan panjang kasus-kasus serupa yang berlangsung secara vulgar di pelosok-pelosok manapun. Politik kontemporer kerap kali menihilkan yang lain, menegasikan kelompok yang berbeda opsi, membungkam suara-suara kritis, dan mengeksklusi kaum papa yang menghalangi ekspansi kapital.

Paling tidak, terdapat dua paradigma politik kontemporer yang dapat ditangkap yakni perspektif teologi politik pada satu pihak, dan teologi ekonomi pada pihak lain. Untuk sedikit melampui perbedaan kedua pandangan tersebut, Yasintus T Runesi memaparkan konsep antropologi politik Helmund Plessner. Bagi Runesi, konsep politik Plessner adalah “tanggapan kritis-objektif atas masalah ideologisasi tubuh manusia sebagai tubuh tanpa bentuk. Teori Plessner menjadi antisipasi atas pandangan reduktif atas diri manusia yang secara fundamental merusak manusia dari dalam, dan menghantar pada suatu fatalisme kemajuan yang tidak membebaskan manusia”. Selain itu, Plessner juga, demikian Runesi, melalui konsep *forma posisi eksentrik* menegaskan adanya daya reflektif pada tiap orang. Daya reflektif itu memungkinkan tiap orang sebagai subyek politik untuk masuk ke dalam dirinya dan berpikir secara kritis tentang makna politik dalam arti tegas. Meski terdapat kontestasi, diskresi dan ruang eksklusi yang lahir dari rahim politik, orang diharapkan untuk selalu merawat martabat dengan refleksi kritis. Hal itu membuat orang “tidak jatuh ke dalam bentuk-bentuk kediktatoran, yang [...] selalu mencari pembenarannya dalam gagasan-gagasan sempit tentang identitas” sebagaimana ditulis Runesi dalam artikel kedua.

Kegagalan subyek politik merefleksikan martabat politik yang memungkinkan orang untuk selalu mengedepankan nalar yang sehat tampak masif dalam politik kontemporer di Tanah Air. Ruang politik di Indonesia dipenuhi oleh hiruk-pikuk hoaks dan ujaran kebencian yang membidani lahirnya konflik horizontal antar warga dan antar umat beragama. Hal ini semakin menegaskan tesis sosiolog Ulrich Beck tentang masyarakat beresiko (*risk society*). Lasarus Jehamat, Yosef Emanuel Jelahun dan Dasma A Damanik dalam artikel ketiga menampilkan refleksi kritis atas politik Indonesia kontemporer yang penuh dengan kegaduhan. Searah dengan Plessner yang menegaskan *forma posisi eksentrik* lewat refleksi kritis, Jehamat dkk pun menawarkan usaha penguatan literasi nalar yang rasional bukan hanya kepada pegiat media melainkan juga kepada seluruh warga.

Atensi yang berlebihan terhadap situasi nasional, atau, secara khusus yang berlangsung di Pulau Jawa, membuat publik di NTT kurang mendiskusikan problem kelautan di NTT. Sebagai propinsi kepulauan, ukuran laut lebih luas daripada daratan di NTT. Potensi besar kelautan diabaikan oleh masyarakat. Hal ini bukan semata-mata kelemahan para pelaut kita, melainkan terlebih oleh kejahatan kolonial dan kegagalan negara yang memungguni laut selama ratusan tahun. Kebijakan negara dalam memberikan kartu nelayan dinilai bermasalah, sebab mengabaikan rantai nilai dalam siklus kelautan, serta mengabaikan perempuan sebagai nelayan, sebagaimana ditulis Paulus AKL Ratumakin dan Hendrikus L Kaha dalam artikel keempat. Refleksi atas kegagalan negara yang memungguni laut dipertajam oleh Elkana Goro Leba dalam artikel kelima. Ia mengajurkan agar kita kembali ke laut. Sebab, sesungguhnya masa depan kita ada di laut.

Pada akhirnya, laut bukan segala-galanya. Laut membutuhkan darat, sebagaimana darat membutuhkan laut. Potensi laut dan potensi darat harus dikembangkan secara bersama-sama dan serius. Mengabaikan laut dan serentak darat menyebabkan masyarakat terjebak pada lingkaran kemiskinan, termasuk menggunakan alokasi dana desa.

Kehadiran negara untuk mengatasi kemiskinan disalurkan melalui dana desa pada era Presiden Joko

Widodo. Asumsi awal bahwa kemiskinan di NTT disebabkan oleh karena keterbatasan modal finansial. Asumsi ini tampak keliru dan dapat dipatahkan ketika dana disalurkan dari pusat ke daerah, ternyata bermasalah pada level pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada relasi lain yang perlu disingkap di tingkat desa yakni adanya relasi-kuasa teknokratis, elitis, dan penyingkiran terhadap kelompok-kelompok kecil, termasuk perempuan, sebagaimana dikemukakan Umu TW Pariangu dalam artikel keenam.

Pada akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca keenam tulisan dalam JAP UNWIRA. Semoga artikel-artikel ini menjadi santapan bergizi bagi pemikiran pembaca. Kehadiran jurnal ini diharapkan membuka ruang perdebatan-perdebatan baru, dan menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengeksekusi kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kita semakin menjadi subyek yang terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan, yang menukik lebih dalam!\*\*\*

## **Bibliografi**

- Dale, Cipry Jehan Paju. 2013. *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni Dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. Labuan Bajo: Sunspirit Books.
- Robison, Richard dan Hadiz, Vedi R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- Robison, Richard. 2009. *Indonesia: The Rise of Capital*. Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing.